

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juli 2023

Waktu : 10.00 WITA-Selesai

**Tempat : Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu
Budaya, Universitas Hasanuddin**

GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB)

IMMANUEL PAREPARE TAHUN 1958-1980



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**

Oleh:

ZULKIFLI TRIADI PUTRA

F81116309

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

SKRIPSI
GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB)
IMMANUEL PAREPARE TAHUN 1958-1980

Disusun dan diajukan oleh:

ZULKIFLI TRIADI PUTRA

F81116309

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 28 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi sejumlah persyaratan.



Dr. Nahdia Nur, M.Hum
NIP. 196412171998031001

Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S
NIP. 196412171998031001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**

Prof. Dr. Akin Duli, M.A
NIP. 19640716 199103 1 010

**Ketua Departemen Ilmu Sejarah
Universitas Hasanuddin**

Dr. Ilham, S.S., M.Hum
NIP. 197608272008011 011

**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Pada hari Jumat, 28 Juli 2023, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

**GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB)
IMMANUEL PAREPARE TAHUN 1958-1980**

Yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 28 Juli 2023



- | | | | |
|---|--------------|---|--|
| 1. Dr. Nahdia Nur, M.Hum. | Ketua | : | |
| 2. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S. | Sekretaris | : | |
| 3. Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D. | Penguji I | : | |
| 4. Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A. | Penguji II | : | |
| 5. Dr. Nahdia Nur, M.Hum. | Konsultan I | : | |
| 6. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S. | Konsultan II | : | |

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Zulkifli Triadi Putra

NIM : F81116309

Departemen/Program Studi : Ilmu Sejarah/Strata 1 (S1)

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB) IMMANUEL PAREPARE TAHUN 1958-1980

adalah karya ilmiah saya sendiri. Karya ilmiah ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi (Universitas Hasanuddin). Penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan kaidah penulisan akademik. Apabila di kemudian hari ternyata di dalamnya terdapat unsur-unsur plagiarisme dan tidak dapat dibuktikan dengan metode historiografi, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 28 Juli 2023

Yang membuat Pernyataan



Zulkifli Triadi Putra

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Alhamdulillah rabbil alamin

Tiada kata lain yang mampu penulis ucapkan selain memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala berkah, rahmat, hidayah, serta petunjuk dan pertolongannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan, dan tak lupa pula penulis haturkan Salawat dan Salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang telah berjuang membawa kita dari alam gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang sehingga kita dapat menikmatinya hingga sampai saat ini. Kecintaan Penulis terhadap kota kecil penuh kenangan tempat dilahirkannya yang penuh akan toleransi membawa penulis tertarik untuk mengkaji sejarahnya lebih dalam lagi dengan berjudul **“Gereja Protestan Di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Immanuel Parepare Tahun 1958-1980”**.

Pada saat proses penyusunan skripsi ini, tidak dapat dipungkiri bahwa penulis mengalami berbagai macam kendala seperti kurangnya sumber dan literature yang sesuai dengan objek kajian, sampai pada minimnya pelaku sejarah yang ditemukan di lokasi penelitian sehingga membuat penulis merasa kesulitan dalam proses penyusunannya. Akan tetapi berkat Ikhtiar dan pertolongan dari Allah SWT, alhamdulillah penulis dapat melewati segala kendala tersebut satu persatu. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga

besar harapan penulis akan adanya saran yang sifatnya membangun untuk melengkapi dan menyempurnakan hasil penelitian ini agar dapat menjadi rujukan dalam penulisan penulisan berikutnya.

Ucapan terima kasih yang paling istimewa penulis berikan kepada kedua orang tua, baik bapak **Syamsul** dan almarhum ibu **Rosmini Amin** atas segala usaha, pengorbanan, doa serta dukungan baik moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis. Serta terima kasih juga kepada ketiga saudara penulis **Zherli Novi Anggreni, Zarwanda Syam** dan **Zulfiqram** atas segala support yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan, terkhusus kepada bapak **Harianto sandji, Jeni amin, Bambang Harianto dan Farida, Ratna Dewi dan Syamsuddin, Yudhi Harianto**, serta keponakan yang selama ini menjadi salah satu sumber penyemangat penulis, **Reski, Alif, Fitrah, Hafiz dan Najwa**.

Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada:

1. **Dr. Nahdia Nur, M.Hum** dan **Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S** selaku pembimbing I dan II penulis yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk serta saran yang sangat membantu penulis dalam penyusunan penelitian skripsi ini. Mulai dari penyusunan kerangka tulisan penulis, pencarian literature, arsip, serta waktu luangnya dalam membaca dan mengoreksi tulisan penulis, tanpa mereka penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga apa yang telah diberikan dan disampaikan oleh kedua

pembimbing terhadap penulis, itu bernilai pahala dan ibadah dihadapan Allah SWT, Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

2. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Prof. Akin Duli, M.A.**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
4. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Departemen Ilmu Sejarah serta dosen Pembimbing Akademik (PA) penulis, bapak **Dr. Ilham S.S, M.Hum** dan ibu **A. Lili Evita, S.S, M.Hum** selaku Sekretaris Departemen. Terima kasih juga kepada seluruh bapak/ibu dosen Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. **Prof. Dr. Abd. Rasyid Asba, M.A.(Alm)**, **Margriet Moka Lappia, S.S, M.S.(Almh)**, **Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum.**, **Dr. Bahar Akkase Teng, Lcp.**, **Dr. Ida Liana Tanjung M.HUM.**, **Dr. Amrullah Amir, S.S, M.A.**, **Dr. Muslimin Effendy, M.A.**, **Dr. Bambang Sulistyono P., M.S.** **Drs. Rasyid Rahman, M.Ag.**, **Nasihin S.S, M.A.**, atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Departemen Ilmu Sejarah.
5. Terima Kasih Pula penulis sampaikan kepada Kepala Sekertariat Departemen Ilmu Sejarah, **Uddjie Usman Pati S.Sos** untuk segala bantuannya kepada penulis dalam mengurus berbagai administrasi mulai awal semester hingga selesainya penulisan skripsi ini.

6. Terima Kasih Kepada seluruh staf administrasi kampus Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu demi kelancaran perkuliahan.
7. Terima kasih Kepada seluruh staf serta pendeta Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Terkhususnya bapak **Irawady Walalangi** yang bekerja sama untuk menyelesaikan tulisan ini.
8. Terima kasih kepada teman-teman PCB **Andre, Awi, Ulleng, Piko, RachmatAde, Fandy, Calip, Miming, Yayat, Rahul, Abdian, Suhadi, Ono dan Aco**. Serta Wanita strong di periode 2015-2016 **Neni, Vio, Dewi, Nia, Nova, Dita** yang telah memotivasi penulis sampai saat ini "*saudara tapi tidak sedarah*"
9. Teman-teman seperjuanganku Historian 16 **Pitto, Allu, Madi, Eve, Siska, Erwin S, Erwin Gutawa, Hendra, Rais, Burhan, Ical, Akang, Ammar, Alam, Dewi, Sinar, Dayen, Selfi, Intan Dwbp, Tati, Kiki, Ega, Ben, Jusni, Erni, Alle, Isman, Arafah, Nisa, Intan Rifana, dan Fahrul**. Terima Kasih untuk semua canda tawanya semasa perkuliahan. Insya Allah akan menjadi cerita yang tiada akhir di hari esok.
10. Kepada Keluarga Besar HUMANIS KMFIB UNHAS, seluruh senior-senior **Kak Maman, Kak Fatin, Kak Apos, Kak Fajar, Kak Adnan, Kak Arul, Kak Dicky** serta yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima Kasih untuk semua pengalaman dan arahnya selama penulis berlembaga di HUMANIS KMFIB UH, serta Adik-adik yang telah membantu penulis **Fahmi, Vivin, Ummi, Ismi, Darwan, Fika, Titan, Widya, Asbi, Rafdi De, Ucil, Baso, Arham, Suci, Eni, Darma,**

Oca, Delo, Sarah, Banyol, Panter De, Aci, Sadli, Akram, Ipin, Ollab, Erlangga, Aliq, Risal, Ulil, Veri, Kirrang, Eki, Ayu, Poni, Ria, dan Kiki.

11. Kepada Keluarga Besar HIPMI PARE, Terkhususnya HIPMI PARE KOMISARIAT BANDAR MADANI. Terima kasih atas waktu dan kebersamaannya dibalik hasil yang istimewa ada proses yang tidak mudah. Terkhususnya **Jonas, Adam, Veri, Aldi, Ilham, Dimas, Ival, Uga, Rehan, Fatur, Basrah, Uci, Iqbal, Iqra, Iccang, Dan Faisal.**
12. Terima kasih kepada Saudara yang senangtiasa membantu dalam segala hal dalam urusan penulis **Kakanda Busrin Raihana S.Kom, M.Ak, Kakanda Tahir, Kakanda Ricko, Kakanda Dayat, Kakanda Bagas, Haikal, Ahmad, Fahri, Budi, Teten, Dan Kakanda Nur Hidayat S.H.**
13. Untuk teman cerita, sahabat, serta kekasih penulis **Sitti Hijrah S.H** yang menemani penulis dalam menghadapi suka dan duka dalam penyusunan skripsi. Terima Kasih sekali lagi penulis ucapkan untuk semua kesabaran, pengorbanan dan kesetiaannya selama ini. Perjalan Baru telah dimulai segala niat baik pasti menemukan jalannya.

Kepada rekan, sahabat, dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih atas setiap bantuan dan doa yang diberikan semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan kalian. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dalam kesempurnaan. Oleh Karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna melengkapi

segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Makassar, 28 Juli 2023

ZULKIFLI TRIADI PUTRA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR GAMBAR	XIII
DAFTAR TABEL.....	XIV
ABSTRAK	XV
ABSTRACT	XVI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. BATASAN MASALAH.....	4
1.3. RUMUSAN MASALAH	5
1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	6
1.5. METODE PENELITIAN	7
1.6. TINJAUAN PUSTAKA	8
1.7. SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA PAREPARE DAN SEJARAH	
<i>NEDERLAND DE KERK (INDISCHE KERK)</i>	11
2.1. KONDISI GEOGRAFIS KOTA PARE-PARE.....	11
2.2. SEJARAH SINGKAT PAREPARE SAMPAI TAHUN 1965	16

2.3.	ASAL USUL PENDUDUK PAREPARE.....	29
2.4.	PERKEMBANGAN KRISTEN DI INDONESIA.....	32
2.5.	SEJARAH SINGKAT <i>GEREJA NETHERLAND DE KERK</i>	40
BAB III LATAR BELAKANG DAN PERKEMBANGAN GEREJA		
PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB) IMMANUEL		
	PAREPARE	46
3.1.	PERKEMBANGAN GPIB	46
3.2.	PERKEMBANGAN GPIB DI PAREPARE.....	51
BAB IV KELEMBAGAAN, AKTIVITAS IBADAH, DAN KEGIATAN SOSIAL		
GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB)		
	IMMANUEL PAREPARE	62
4.1.	ORGANISASI GEREJA.....	62
4.2.	AKTIVITAS IBADAH	65
4.3.	KEGIATAN SOSIAL	73
4.3.1.	<i>Persekutuan Intra Jemaat GPIB</i>	74
4.3.2.	<i>Persekutuan Antar Gereja</i>	76
4.3.3.	<i>Persekutuan dengan Umat Beragama Lain</i>	77
BAB V PENUTUP.....		
5.1.	KESIMPULAN.....	83
5.2.	SARAN.....	87
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN.....		
		95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Denah GPIB Immanuel Parepare	56
Gambar 2. Papan nama gereja.....	57
Gambar 3. Ruang belakang gereja	57
Gambar 4. Tampak pintu depan gereja GPIB Immanuel Parepare	58
Gambar 5. Simbol khas GPIB Immanuel Parepare.....	59
Gambar 6. Desain atap Gereja GPIB Immanuel Parepare	59
Gambar 7. Altar Gereja GPIB Immanuel Parepare.....	60
Gambar 8. Tampak depan Gereja Immanuel Parepare	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	72
--------------	----

ABSTRAK

Zulkifli Triadi Putra (F8116309), dengan judul “Gereja Protestan Di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Immanuel Parepare Tahun 1958-1980”, dibimbing oleh Dr. Nahdia Nur, M.Hum dan Drs. Dias pradadimara, M.A., M.S.

Skripsi ini mengkaji sejarah Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Immanuel Pare-Pare dalam rentang waktu 1958 hingga 1980. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perkembangan, peran, dan tantangan yang dihadapi GPIB Immanuel Pare-Pare selama periode tersebut, serta kontribusinya terhadap perkembangan agama Protestan di Indonesia Bagian Barat.

Dengan menggunakan pendekatan metodologi sejarah, penelitian ini menggabungkan sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi dokumen-dokumen gereja, arsip, catatan resmi, laporan kegiatan gereja, dan dokumentasi fotografis. Sementara itu, sumber sekunder mencakup literatur sejarah gereja, penelitian terdahulu, artikel, dan sumber-sumber terkait.

Penelitian ini menganalisis pendirian GPIB Immanuel Pare-Pare, struktur organisasi gereja, perkembangan bangunan dalam periode 1958-1980. Gereja ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk pembangunan gereja dan sarana ibadah, interaksi dengan masyarakat sekitar dan kesejahteraan sosial. GPIB Immanuel Parepare juga aktif dalam kerjasama dengan gereja-gereja lain dan upaya menjaga kerukunan antar agama di daerah tersebut.

Kata Kunci: Gereja Protestan, Indonesia Bagian Barat, GPIB Immanuel Pare-Pare, 1958-1980.

ABSTRACT

Zulkifli Triadi Putra (F8116309), with the title " Gereja Protestan Di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Immanuel Parepare Tahun 1958-1980", supervised by Dr. Nahdia Nur, M.Hum and Drs. Dias pradadimara, M.A., M.S.

This thesis examines the history of the Protestant Church in Western Indonesia (GPIB) Immanuel Pare-Pare from 1958 to 1980. The aim of this research is to provide a comprehensive understanding of the development, role, and challenges faced by GPIB Immanuel Pare-Pare during that period, as well as its contribution to the development of Protestantism in Western Indonesia.

Using a historical methodological approach, this study combines primary and secondary sources. Primary sources include church documents, archives, official records, reports on church activities, and photographic documentation. Meanwhile, secondary sources include church history literature, previous research, articles, and related sources.

This study analyzes the establishment of GPIB Immanuel Pare-Pare, the organizational structure of the church, the development of buildings in the 1958-1980 period. This church faces various challenges, including the construction of churches and places of worship, interaction with the surrounding community and social welfare. GPIB Immanuel Pare-Pare is also active in collaborating with other churches and efforts to maintain interfaith harmony in the area.

Keywords: Gereja Protestan, Indonesia Bagian Barat, GPIB Immanuel Pare-Pare, 1958-1980.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Menulis sejarah komunitas/gereja adalah bagian dari sejarah lokal. Perspektif historiografi Indonesia kebanyakan hanya bercerita tentang peristiwa-peristiwa besar dan monumental, sedangkan cerita-cerita kecil seperti desa-desa lokal dan khas kurang menarik. Penulisan sejarah gereja atau sejarah jemaat Kristen merupakan bagian dari historiografi Indonesia yang kurang mendapat perhatian baik dari kalangan sejarawan amatir maupun akademisi.

Beberapa karya yang representatif dalam penulisan sejarah gereja mulai tumbuh sejak tahun 2000-an, di antaranya Kaunang, 2014: GMIM Sola Gratia Tikala (2002), Sejarah Jemaat GMIM Imanuel Bahu (2003), dan Sejarah Jemaat GMIM Pondang Amurang yang ditulis Parengkuan (2011).¹ Begitupula dengan penulisan sejarah dikalangan Mahasiswa S1 Universitas Hasanuddin, mulai diarahkan pada persoalan-persoalan kecil, yang sederhana, termasuk sejarah gereja/jemaat, masih kurang dilirik khususnya dilingkup Universitas Hasanuddin.

Awal masuknya gereja dapat ditelisik dari peranan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), tahun 1605 Gereja Protestan di Indonesia (GPI) lahir di Ambon dan Maluku, dengan nama *De Protestantche Kerk In Nederlandsch-Indie* atau lebih dikenal dengan *Indische Kerk*. Gereja ini tidak

¹ Kaunang “Sejarah Jemaat Gmim Imanuel Ranowangko Tanawangko”, *Jurnal LPPM Bidang Ekosobudkum*, Volume 1 Nomor 1, 2014, Hlm 80-81.

dapat dipisahkan dari bagian gereja di Belanda sebagai ibu-induk bagi Gereja-gereja yang terbentuk di Indonesia.²

Pada tahun 1619 kedudukan *Indische Kerk* dipindahkan ke Batavia, ketika jabatan Gubernur Jenderal juga dipindahkan ke Batavia. Gereja Protestan itu mengambil alih jemaat yang ditinggalkan oleh misi Portugis dan kemudian memperluas pelayanannya berkat misi tersebut. Karena daerah pelayanan *De Protestantische Kerk in Nederlandsch-Indie* begitu luas, timbul masalah di beberapa daerah pelayanan. Pada tahun 1927, misalnya diadakan pertemuan para pendeta yang merumuskan sikap bahwa kesatuan gereja akan dipertahankan, tetapi masing-masing daerah akan lebih mandiri dalam mengatur pelayanan mereka sendiri. Pada tahun 1933 terjadi pertemuan besar di mana jemaat Minahasa, Maluku dan Timor mendapat kebebasan untuk menjadi gereja-gereja mandiri dalam jemaat *De Protestantische Kerk in Nederlandsch-Indie*.

Kemudian pada tahun 1948 terjadi perubahan ketika sidang Sinode di Bogor memutuskan bahwa jemaat di bagian barat dari tiga gereja bersaudara menjadi gereja mandiri dengan nama sebagai berikut: Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB). Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) adalah perkumpulan umat Kristen Protestan Indonesia yang didirikan dan dasar dan kepalanya yaitu Tuhan Yesus Kristus. GPIB adalah bagian dari Gereja Protestan Indonesia (GPI), yang bernama *De Protestantse Kerk In Westelijk Indonesia* pada zaman Hindia Belanda. Pelembagaan dan pembentukan GPIB sebagai gereja merdeka keempat di

² Kruger "Sedjarah Geredja Di Indonesia" Badan Penerbitan Kristen-Djakarta, 1959. Hlm 38.

lingkungan GPI sesuai Surat Keputusan Perwakilan Tinggi Kerajaan Belanda Indonesia No. 2 tanggal 1 Desember 1948.³

Salah satu gereja GPIB klasis⁴ Sulawesi berada di Parepare yang dulunya bernama gereja *Nederland De Kerk*. Gereja ini dibangun kisaran tahun 1825 yang kemudian menjadi tempat ibadah anggota-anggota gereja protestan terutama anggota militer belanda.⁵ Awal dibangunnya gereja ini berbentuk semi permanen dan sekitar pada tahun 1944 baru dibangun rumah pastori berbentuk darurat yang ditempati oleh pendeta.

Gereja *Nederland De Kerk* sendiri berganti nama pada tahun 1958 tepatnya bulan maret menjadi Gereja Immanuel Parepare, nama gereja ini dipilih oleh jemaat gereja itu sendiri. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Parepare terletak di jalan Bau Massepe No.470 Parepare, Sulawesi Selatan.

Gereja jemaat GPIB Immanuel Parepare juga dipakai oleh jemaat Gereja Toraja dan Gereja GKI, karena pada waktu itu kedua jemaat tersebut belum memiliki gereja masing-masing. Sekitaran tahun 1950 Gereja Toraja baru dibangun namun jemaat protestan toraja masih menggunakan gedung gereja

³ <https://www.Cahayakasih.Org>. “Sejarah Gereja Protestan Di Indonesia Bagian Barat”. Diakses Pada 15 September 2021.

⁴ Klasik Merupakan Sebuah Istilah Yang Dipergunakan Untuk Menyebut Suatu Tingkatan Kemajelisan Dalam Gereja Kristen Protestan.

⁵ Anonim. “Tentang Adanya Gereja Di Parepare Sekitar Kurang Lebih Abad XVIII Dan Abad XIX”, Parepare: Dokumen GPIB, 2020, Hlm 3.

GPIB hingga tahun 1959 untuk melakukan kebaktian.⁶ Begitu juga dengan jemaat GKI pindah pada gerejanya yang dibangun pada tahun 1980.⁷

Aktivitas gereja dengan jemaat yang besar tentu saja memerlukan pengelolaan dan dinamika didalam perjalanannya, belum lagi aktivitas secara luas yang dilakukan baik yang terkait dengan ibadah maupun aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya. Dengan pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk menulis tentang topik ini dengan judul ***“Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Parepare Tahun 1958-1980”***.

1.2. Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian sejarah, sejarawan harus membatasi ruang lingkup penelitiannya. Batasan masalah dalam historiografi terbagi menjadi dua bagian, yaitu batas tempat (spasial) dan batas waktu (temporal). Pembatasan dibuat sedemikian rupa sehingga penelitian dipusatkan pada bidang tertentu dan dalam waktu tertentu tanpa harus meninggalkan pokok bahasan. Pembatasan juga dilakukan agar penelitian lebih terfokus pada penulisan.

Lingkup Temporal diambil dari tahun 1958 sampai dengan tahun 1980. Pilihan jangka waktu tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain: pertama–tama penulis ingin mengetahui kapan dan apa yang menjadi latar belakang dibangunnya Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Parepare. Lalu kedua, bagaimana perkembangan Gereja Protestan di Indonesia

⁶ Anonim. “Perayaan Hari Ulang Tahun Gereja Toraja Jemaat Parepare”, Parepare: Dokumen Gereja Toraja Jemaat Parepare, 2020, Hlm 9.

⁷ Anonim. Tentang Adanya Gereja Di Parepare Sekitar Kurang Lebih Abad XVIII Dan Abad XIX, Parepare: Dokumen GPIB, 2020, Hlm 6.

bagian Barat (GPIB) Immanuel Parepare. Oleh karena itu, penulis memilih rentan tahun 1958 sampai dengan tahun 1980. Karena pada tahun 1958 dimulainya penggunaan nama Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Parepare, sedangkan pada tahun 1980 salah satu jemaat yaitu jemaat GKI yang menggunakan GPIB untuk melakukan peribadatan berpindah ke gereja yang dibangun pada tahun ini pula.⁸ Jemaat GKI ini merupakan jemaat terakhir diluar jemaat GPIB yang menggunakan GPIB sebagai tempat peribadatan.

Lingkup Spasial dari penulisan ini yaitu Kota Parepare, tepatnya di jalan Bau Massepe dan sekitarnya. Fokus penelitian penulis adalah Gereja, terkhususnya Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Parepare.

1.3.Rumusan Masalah

Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Parepare merupakan gereja protestan tertua yang terdapat di Kota Parepare. Sudah sejak lama gereja ini menampung jemaat yang beribadah terkhususnya penganut protestan di Kota Parepare. Gereja ini dibangun sekitar tahun 1825 dengan nama *Nederland De Kerk* dan berganti nama menjadi Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Parepare pada tahun 1958. Gereja ini telah dilakukan pemugaran sehingga telah menjadi bangunan permanen dan menjadi salah satu cagar budaya yang ada di kota Parepare.

Adapun Gereja jemaat GPIB Immanuel Parepare juga dipakai oleh jemaat Gereja Toraja dan Gereja GKI untuk beribadah. Namun setelah semakin

⁸ (Anonim, 2020b). Tentang Adanya Gereja Di Parepare Sekitar Kurang Lebih Abad XVIII Dan Abad XIX, Parepare: Dokumen GPIB, 2020, Hlm 6.

banyaknya jumlah jemaat yang ada maka jemaat dari gereja toraja sehingga jemaat gereja toraja berpindah tempat untuk melakukan kebaktian. Adanya pula pembangunan gereja GKI untuk jemaatnya sehingga jemaat gereja GKI berpindah untuk melakukan kebaktiannya pada tahun 1980.

Agar tulisan ini fokus dan tidak menyimpang dari jejak tulisan, maka dalam pembahasan ini penulis mengusulkan rumusan masalah pokok yang akan diteliti dan merumuskannya sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang berdiri dan berkembangnya Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Parepare tahun 1958-1980?
2. Bagaimana perkembangan aktivitas ibadah, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan kelembagaan jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Parepare selama periode penelitian ini?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Parepare pada tahun 1958-1980. Secara operasional tujuan tersebut adalah untuk:

1. Untuk mengetahui latar belakang berdiri dan berkembangnya Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Parepare.
2. Untuk mengetahui perkembangan aktivitas ibadah, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan kelembagaan jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Parepare.

Sedangkan manfaat Penelitian:

1. Tulisan ini dapat menjadi referensi bagi para sejarawan/peneliti yang tertarik untuk menulis dan mempelajari sejarah gereja dan tulisan tentang kota Parepare.
2. Menambah koleksi kajian mengenai sejarah Gereja dan khususnya di Kota Parepare.
3. Menambah catatan sejarah mengenai Gereja yang khususnya untuk wilayah Kota Parepare.

1.5. Metode Penelitian

Upaya penulis untuk merekonstruksi peristiwa sejarah yang menjadi objek penelitian, penulis melakukan beberapa tahap-tahapan sebagai berikut:

Heuristik sebagai tahapan pertama penelitian dalam penelusuran sumber-sumber sejarah primer dan sekunder. Sumber primer didapatkan dari website delpher.nl, seperti peraturan gereja, catatan perjalanan, dan lainnya. Sumber utama dari penelitian ini didapat dari arsip GPIB Immanuel Parepare yang berada di Kota Parepare. Selain itu sumber pendukung ialah buku, jurnal dan website protestan. Adapun wawancara akan dilakukan dengan narasumber yaitu Pendeta Gereja GPIB sekarang serta pendeta yang pernah melayani peribadatan pada gereja GPIB dan jemaat Gereja GPIB.

Kritik sumber (kritik interen), tahap pemeriksaan berbagai informasi dan fakta dari berbagai sumber. Dengan bantuan kritik interen, kesesuaian sumber dengan isinya ditetapkan dan apakah sumber itu rasional atau tidak rasional (keaslian dan kredibilitas).

Langkah selanjutnya adalah interpretasi, di mana fakta diinterpretasikan menggunakan informasi yang keasliannya telah diverifikasi sesuai dengan metode kritik sumber yang digunakan. Dan tahap terakhir adalah historiografi, yang menyajikan gambaran gereja Protestan di Indonesia bagian barat Immanuel Parepare dari tahun 1958 hingga 1980 disusun dengan konsep kronologis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh. Penulisan ini menambah satu tulisan dalam historiografi gereja di Indonesia.

1.6. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan tentang Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Parepare di Kota Parepare bersumber pada beberapa data primer. Adapun beberapa inventaris arsip yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Arsip Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Parepare “ Tentang adanya gereja di Parepare sekitar kurang lebih abad XVIII dan Abad XIX”, dalam arsip ini penulis dapat mengetahui sejarah gereja *Nederland Indie De Kerk* yang saat ini berganti nama menjadi Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Parepare, dapat juga diketahui dalam arsip ini tahun terbentuknya gereja-gereja lainnya yang ada di Parepare, serta beberapa pendeta-pendeta yang bertugas dalam pelayanan di gereja GPIB Immanuel Parepare.

Randas Tata Gereja “Naskah pemahaman Latar Belakang Penyusunan Tata Gereja GPIB”, dalam Aturan ini penulis dapat mengetahui pemerataan mengenai konsep tata gereja yang dimaksudkan tentang pemikiran dan pengalaman, baik di lingkup jemaat dan Sionidal. Naskah ini pula menjelaskan tentang tata pelayanan yang tertib yang diterapkan GPIB.

Sihombing, (2019). “Sejarah Gereja Di Indonesia”. Dalam tulisan ini penulis dapat mengetahui sejarah gereja yang ada di Indonesia. Bagaimana gereja terbentuk di zaman misi katolik roma, zaman zending VOC, dan zaman zending oleh lembaga-lembaga PI dari Eropa, serta bagaimana sejarah masuknya agama Kristen di Indonesia. Tulisan ini pula digunakan sebagai bahan ajar Di Sekolah Tinggi Teologi (STT) HKBP Pematangsiantar.

Kruger, (1959). “Sedjarah Geredja di Indonesia”, Dalam buku ini penulis mempelajari bagaimana gereja di Indonesia muncul dan seperti apa organisasi, ajaran dan kehidupan gereja pada zaman VOC. Buku ini pula menjelaskan bagaimana sejarah gereja Kristen Bugis/Makassar pada pertengahan abad ke-20.

Pinem. “Sejarah, Bentuk dan Makna Arsitektur Gereja GPIB Bethel Bandung” Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 14, No. 2, 2016. Dalam tulisan ini, penulis dapat mengetahui sejarah, bentuk dan makna arsitektur Gereja GPIB Bethel Bandung. Artikel ini menjelaskan tentang sifat-sifat ruang arsitektur Gereja Protestan, yaitu: Pertama, salib kosong tanpa patung Yesus, melambangkan Yesus yang bangkit dari kematian dan naik ke surga. kedua, tidak ada patung orang suci atau tempat suci khusus. ketiga, tidak ada biara. Keempat, tekankan ibadah sehingga instrumen (organ) menjadi bagian penting dari ibadah. Artikel ini dipresentasikan pada Seminar Penelitian Rumah ibadah kuno, Rabu hingga Jumat, pukul 15.00. sampai jam 5 sore. September 2014 di Amaro Hotel Bandung.

Anonim, (2020) “Pereyaan Ulang Tahun Gereja Toraja Jemaat Parepare”, didalam arsip ini penulis dapat mengetahui bahwa jemaat Protestan toraja di Paepare

masih menggunakan GPIB sebagai tempat melakukan kebaktian hingga tahun 1959 walaupun Gereja Toraja sudah ada pada tahun 1953.

1.7.Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan kajian ini dan untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis tentang “Gereja Protestan Indonesia Barat Immanuel Parepare”, telah disusun klasifikasi tertulis yang terdiri dari lima bab yang merupakan pokok-pokok uraian proposal ini. pembahasan disusun sebagai berikut:

BAB 1, bab ini berisi pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang; Batasan Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan dan Manfaat Penelitian; Metode Penelitian; Tinjauan Pustaka; dan Sistematika Penulisan.

BAB 2, pada bab ini akan membahas mengenai Gambaran Umum Kota Parepare, Bagaimana Kondisi Geografis Kota Parepare, Kondisi Sosial, Sejarah dari Kota Parepare, serta Sejarah *Nederland De kerk*.

BAB 3, pada bab ketiga akan membahas mengenai latar belakang berdiri dan berkembangnya Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Parepare di Kota Parepare.

BAB 4, pada bab keempat akan membahas mengenai perkembangan aktivitas ibadah, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan kelembagaan jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Parepare di Kota Parepare.

BAB 5, Bab terakhir berisi kesimpulan, yaitu kesimpulan yang diambil dari informasi pada BAB 1 - BAB 4 sebagai jawaban atas permasalahan pada pendahuluan.

BAB II
GAMBARAN UMUM KOTA PAREPARE DAN SEJARAH
NEDERLAND DE KERK (INDISCHE KERK)

2.1. Kondisi Geografis Kota Pare-pare

Kota Pare-pare merupakan salah satu kota terpenting di provinsi Sulawesi Selatan dan terletak ± 155 km² sebelah utara kota Makassar, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Jarak antara kota Pare-pare dengan kota Makassar melalui jalan darat memakan waktu sekitar 3-4 jam. Kota Pare-pare terletak pada 030 Lintang Utara, 060 Lintang Selatan dan 1180 Bujur Timur. Tempat ini menjadikan Parepare sebuah kota di bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan, berbatasan di sebelah Timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang, di sebelah Utara dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Barru dan di sebelah Barat dengan Selat Makassar.⁹

Secara geografis, Kota Pare-pare merupakan kawasan yang dilalui jaringan jalur-jalur regional, yaitu: Pare-pare - Makassar, Makassar – Mamuju, Makassar - Tana Toraja, Makassar - Wajo - Soppeng, Makassar - Palopo, selain itu pula merupakan jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Makassar – Palu, Makassar – Manado, dan Makassar – Kalimantan.¹⁰

⁹ Bappedda dan Kantor Statistik TK II Kotamadya, 1942, *Parepare Dalam Angka 1993*, (Parepare Cabang Perwakilan BPS Kantor Statistik Kotamadya Parepare, 1942). hlm. 1.

¹⁰ Umar, *Buruh Pelabuhan di Parepare 1961 – 1998*, (Makassar, Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, 2009). hlm. 20.

Pada tahun 1930 Pare-Pare masih merupakan kota yang sepi dengan penduduk hanya sekitar 28.937 jiwa dan luasnya tidak seperti sekarang ini, luas Pare-Pare sekarang hanya berada di wilayah Soreang yang Wilayahnya kini menjadi pusat kota Pare-Pare, sedangkan Bacukiki dan Nepo merupakan kawasan pegunungan, hutan, dan perkebunan dengan jumlah penduduk sekitar 22.664 jiwa. Ada pula kawasan yang belum tersentuh di kawasan Soreang, sebelah timur kawasan Kampung Pisang, yang masih merupakan perkebunan milik warga setempat. Kawasan Bacukiki lebih alami karena masih banyak kawasan yang belum terjamah oleh pemerintah. Seperti di distrik Lapadde saat ini, di sini dulunya terdapat gundukan tanah dan taman milik warga. Kawasan Labukkang hanya memanjang hingga pelabuhan Nusantara dan di sebelah timur Islamic Center masih terdapat daratan yang penuh dengan goa kepiting. Sedangkan wilayah Nopo merupakan wilayah administratif Kabupaten Barru saat ini.¹¹

Dilihat dari luas wilayahnya, Kota Pare-pare merupakan daerah perbukitan dan pegunungan. Sekitar 85% luas kota pare-pare berupa perbukitan, bergelombang dan pegunungan, sisanya sekitar 15% berupa dataran di bagian barat, membentuk pusat niaga kota pare. karena rata-rata ketinggian daerahnya 25 mdpl, sedangkan di bagian perbukitan 500 mdpl.¹²

Secara administratif Kota Pare-pare terdiri atas 3 kecamatan yang terdiri dari 21 kelurahan ataupun desa yang terdiri atas:

¹¹Karlina., *Komunitas Tionghoa di Parepare 1906 – 1959*, (Makassar, Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, 2015).

¹² Syukriyati, *Kota Parepare Tahun 1960 -1997 (Suatu Tinjauan Morfologi Kota)*. (Makassar, Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, 2002). Hlm. 14.

1. Kecamatan Bacukiki, yang terdiri dari kelurahan Cappa Galung, Watang Bacukiki, LemoE, LompoE, Bumi Harapan, Watang Bacukiki, Sumpang MinangaE, Cappa Galung, Lumpue, Mattiro Sompe dan Kampung Baru.
2. Kecamatan Ujung, yang terdiri dari kelurahan Lapadde, Mallusetasi, Ujung Bulu, Ujung Sabbang dan Labukkang.
3. Kecamatan Soreang yang terdiri dari kelurahan Kampung Pisang, Lakessi, Bukit Indah, Ujung Baru, Harapan , Watang Soreang dan Bukit Ujung Lare.¹³

Menurut Andi Oddang (2005), pusat kota Pare-Pare, Jika titik poros diambil dari pasar (Jalan Sultan Hasanuddin sekarang) ke utara, batas kota hanya sampai pada tangsi tentara (Asrama CPM sekarang) Bangunan tangsi pun tidak sebesar sekarang bagian belakang tangsi masih ada area persawahan. Di sebelah kirinya (Jalan Andi Makkasau sekarang) masih sepi, separuhnya masih berupa kandang babi. Ke arah Utara, daerah Lontange' (Pasar Lakessi sekarang) masih berupa rawa. Rumah Sakit Umum (kantor P&K sekarang) di Pare-Pare saat itu telah ada, tetapi bagian belakang bangunan rumah sakit masih berupa bukit-bukit, sebagian kebun milik keluarga La oddo daeng Massaro.¹⁴

¹³ Bappedda Dan Kantor Statistik TK II Kotamadya Parepare, *Parepare Dalam Angka 1993*, (Parepare Cabang Perwakilan BPS Kantor Statistik Kotamadya Parepare, 1942). Hlm. 2.

¹⁴ Oddang, Bayar Sekolah Satu Golden. Dalam Buku Otografi Tulisan Andi Makmur Makka Dkk, *Dalam Pare-Pare Dalam Siklus Waktu: Kesan Dan Kenangan Warga Kota, Pemkot Pare-Pare*, 2005. Edisi I. Hlm. 20.

Kondisi kota Pare-Pare pada masa pemerintahan Belanda tidak hanya bergerak dalam bidang perniagaan terdapat pula sarana pendidikan yang menjadi tempat menimba ilmu bagi anak Pribumi, Tionghoa dan Indo Belanda. Menurut Andi Oddang (2005) ketika masa penjajahan Belanda di Pare-Pare, dan daerah sekitarnya, masyarakat jelata digolongkan ke dalam kelas dua, kesempatan terbatas untuk mengakses pendidikan, kebanyakan mereka menjadi petani. Posisi paling tinggi bisa menjadi Pegawai Negeri (*Ambtenaar*) atau Juru Tulis (*Klrek*) atau biasa dipanggil "*Tuan Klerk*".¹⁵

Dalam perkembangan selanjutnya, hasil penerapan kebijakan etika tersebut membawa perbaikan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Pare-Pare. Ada lima sekolah di Pare-Pare, termasuk HIS (Hollands Indian School) dengan tujuh kelas, Hollandsch Chineesche School (HCS)¹⁶ dengan lima kelas, Vervolg School dengan enam kelas, Volks School dengan tiga kelas dan School Europese Lagere dengan tiga kelas, Sekolah ini menerima anak-anak khusus orang barat dan Indo-Belanda. Selain sekolah yang didirikan orang Belanda, ada juga sekolah swasta, yaitu Perguruan umum terdiri dari enam kelas yang didirikan oleh

¹⁵ Oddang, Bayar Sekolah Satu Golden. Dalam Buku Otografi Tulisan Andi Makmur Makka Dkk, Dalam Pare-Pare Dalam Siklus Waktu: Kesan Dan Kenangan Warga Kota, Pemkot Pare-Pare, 2005. Edisi I. Hlm. 15.

¹⁶ Ibid, kemungkinan andi oddang sedikit keliru dalam menyebutkan hollandsch Chineesche School (HCS) menjadi Europese Cinese School (ECS), karena pada masa pemerintahan hindia belanda tidak ada sumber yang menuliskan mengenai ECS.

seorang lokal, Haji Moch. Djafar adalah seorang pedagang tekstil.¹⁷ Sedangkan SMP berada di Pare-Pare MS (Middelbare School).

Sekolah-sekolah tersebut tidak jauh dari Masjid Jami (sekarang Masjid raya). Masjid Jami merupakan masjid terbesar di kota pare-pare. Donatur termasuk pengusaha dan tokoh masyarakat. Hampir semua pedagang Pare-Pare adalah donatur aktif. Masjid Jami berada tepat di sebelah terminal bus antar kota "Kandang Oto" (sekarang menjadi tugu korban 40.000 orang), tempat 23 pejuang anti kolonial Belanda dieksekusi oleh pasukan Westerling. Hanya ada satu lokasi pasar tradisional sejajar dengan tokoh dari selatan ke utara menghadap ke laut. Semua kebutuhan penduduk bisa terpenuhi di toko-toko ini. Para pedagang yang memiliki toko di pasar tidak hanya penduduk lokal tetapi juga warga Tionghoa.

Saat itu sudah ada dua bioskop di Pare-Pare milik pengusaha angkutan Ban Hong Liong dan satu lagi pengusaha milik Ban Hwat Hien. Bioskop itu ditutup setelah pembubaran NIT. Lalu ada bioskop lain bernama Capitol (sekarang di Jalan Sultan Hasanuddin), kemudian berganti nama menjadi Surjo, milik A. Wawo, putra Arung Mallusetasi. Lalu ada bioskop Rex yang berganti nama menjadi Ras (sekarang menjadi hotel dan restoran). Dulu juga ada sekelompok etnis Tionghoa di sekitar Jalan Baso Daeng Patompo yang membuka kafe, laundry/wasserij, dan toko kelontong.

Letak geografis yang strategis tersebut merupakan faktor pendukung yang memungkinkan Kota Parepare bisa memenuhi peran strategisnya dalam

¹⁷ Oddang, Bayar Sekolah Satu Golden. Dalam Buku Otografi Tulisan Andi Makmur Makka Dkk, Dalam Pare-Pare Dalam Siklus Waktu: Kesan Dan Kenangan Warga Kota, Pemkot Pare-Pare, 2005. Edisi I. Hlm. 12.

pembangunan daerah di tingkat lokal bahkan nasional. Dalam keadaan seperti ini, peran ekonomi Kota Pare-pare begitu penting.

2.2. Sejarah singkat parepare sampai tahun 1965

Pada awal perkembangannya, Kota Parepare merupakan hutan yang ditumbuhi pohon bakau dengan lubang tanah liat yang landai di antaranya, dari utara (Cappa Galung) dan menuju ke selatan kota. Proses perkembangan sejarah inilah yang menyebabkan dataran tinggi tersebut kemudian dikenal dengan sebutan “Parepare”.¹⁸

Lontara Kerajaan Suppa menyebutkan bahwa putra Raja Supa meninggalkan istana sekitar abad ke-15 dan pergi ke selatan untuk membangun wilayahnya sendiri di pesisir pantai karena gemar memancing. Daerah tersebut kemudian yang dikenal dengan nama Kerajaan Soreang, kemudian berdiri kerajaan lain sekitar abad ke-16 yaitu Kerajaan Bacukiki. Di antara kedua kerajaan ini tumbuh semak-semak yang tumbuh tidak beraturan di sepanjang pantai dari Soreang hingga Bacukiki.¹⁹

Kata Parepare sendiri diciptakan oleh sejarah Raja Gowa X yang disebut I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiyung Tunipallangga Ulaweng (1546-1565). Mendarat di Soreang dalam perjalanan kunjungan dagang, ia kemudian melakukan perjalanan dari Kerajaan Soreang ke Kerajaan Bacukiki. Raja Karaeng

¹⁸ Muh.Said, Migrasi Orang Enrekang Ke Parepare 1950-1965. (Parepare: Institute, 2019), Hlm.49-50

¹⁹ Muzakkir & Dkk., *Parepare Dekade 2005-2015*, (Makassar: PP HIMPI PARE, 2005), Hlm.2

Tunipallangga dari Gowa, Seorang raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan perintis pembangunan, yang tertarik dengan pemandangan indah tempat ini dan spontan berkata “Bajiki Ni Pare”, yang artinya kawasan ini cocok untuk dijadikan pelabuhan.²⁰

Sejak itu, nama Parepare (yang dibuat dan digunakan). Sejak kunjungan Raja Gowa, Kerajaan Soreang mengembangkan kawasan Pare-pare menjadi kawasan pelabuhan. Istana raja Arung Soreang “Sao Raja Mattanrue” yang megah ini menjadi pusat pemerintahan. Hingga parepare ramai dikunjungi pada pedagang yang datang di daerah ini.²¹

Karena posisinya yang sangat strategis, terlindung oleh teluk dan ombak yang tidak begitu besar, tempat ini kemudian berkembang menjadi pelabuhan, sehingga berhasil mengalihkan sebagian besar aktivitas pelabuhan Soreang saat itu.²²

Dalam perkembangan selanjutnya, Kerajaan di sekitar Makassar mendirikan pusat perdagangan di Sulawesi Selatan yang disebut bandar Makassar. Bandar ini merupakan pengembangan dari dua pelabuhan dari dua kerajaan yaitu Pelabuhan Tallo dan Pelabuhan Somba Opu. Strategi pengembangan dilakukan melalui penerapan kebijakan untuk menghilangkan pengaruh bandar di sekitarnya.

²⁰ Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Madya Parepare Volume I Periode Tahun 1889-1981, (Makassar; Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, 2017). Hlm. VI.

²¹ Wawancara Dengan Andi Bustan Oddo, Anak Dari Raja Petta Oddo Yang Merupakan Keturunan Arung Soreang.

²²Pemerintah daerah Kota Parepare, *Parepare Kota Bersahaja*, (Parepare: Pemerintah Kota Parepare, 1993).Hlm. 5.

Raja Gowa X Karaeng Lakiung Tunipalangga Ulaweng (1546 - 1565) melancarkan ekspedisi untuk menaklukkan kerajaan pesisir yang aktif dalam perdagangan laut dan memaksa mereka untuk menyatakan krar *makkanamanu mammio* (aku bertitah dan kamu menaatinya).²³ Adapun kerajaan yang ditaklukkannya adalah kerajaan bacukikik dan kerajaan suppa yang berada dikawasan pare-pare.

Pada tahun 1582, di Ajatappareng terdapat lima kerajaan yang membentuk konfederasi yang disebut Limae Ajatappareng. Lima Kerajaan itu antara lain Sawitto, Suppa, dan Sidenreng. Alitta dan Rappang Sawitto berada di ujung barat seberang Selat Makassar. Suppa terletak di bagian tenggara pelabuhan di Soreang. Rappang di timur, di samping Maiwa di utara dan Wajo di timur. Sidenreng berbatasan dengan Soppeng di selatan dan Wajo di timur.²⁴

Pelabuhan Pare-Pare di Soreang berfungsi sebagai pusat komersial dan administrasi kawasan pantai barat. Daerah pesisir terpencil dan strategis untuk kapal, dan lokasinya yang strategis menjadikan kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Suppa, Kerajaan Mallusetasi dan Kerajaan Sidenreng bersaing memperebutkan pelabuhan Pare-Pare. Kota pelabuhan itu mundur ketika pemerintah Belanda menyerahkan wilayah Makassar dan wilayahnya, termasuk Pare-Pare, kepada pemerintah Inggris pada tahun 1812. Namun, hal tersebut tidak

²³ Poelinggomang & Dkk, , Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I. Badan Penelitian Dan Pembangunan Daerah (Balitbangda), Provinsi Sulawesi Selatan, 2004. Hlm. 14-15.

²⁴ Latif, Para Penguasa Ajatappareng. Ombak. Yogyakarta. 2014. Hlm.1.

berlangsung lama hingga Belanda kembali menguasai wilayah tersebut pada tahun 1816.²⁵

Berdasarkan Perjanjian Bongaya, yang diperbarui di Makassar pada tanggal 9 Agustus 1824, pemerintah Hindia Belanda memiliki kekuasaan yang luas hingga akhirnya memantapkan kekuasaannya di Sulawesi Selatan. Nama yang diberikan ialah *Celebes en Onderhoortgeden* yang kemudian dibagi atas tiga kategori, yaitu:

1. Negeri-negeri yang berlangsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda.
2. Negeri-negeri dan kerajaan-kerajaan yang tidak langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda.
3. Kerajaan-kerajaan merdeka yang hubungannya dengan Pemerintah Hindia Belanda didasarkan pada perjanjian Bongaya yang telah diperbaharui tersebut.²⁶

Pada awalnya pelabuhan Pare-Pare adalah milik Suppa sebagai wilayah Suppa, namun kemudian pada tahun 1825 pecah perang antara kerajaan Suppa dengan sekutu Belanda. Suppa yang mendapat bantuan dari Sawitto dan Alitta harus ditangkap oleh sekutu dari berbagai arah. Belanda, Ambon dan Ternate menyerang dari laut sedangkan Sidenreng dan sekutunya menyerang dari selatan. Setelah sekutu Belanda memenangkan perang, Belanda memberikan Pare-Pare kepada

²⁵ Mutawakkil, Kota Parepare 1960-2000 (Profil Kota Kecil Dan Perkembangannya), Makassar. Tesis Pasca Sarjana Unm, Makassar, 2001, Hlm. 34.

²⁶ Limbugau. Perjalanan Sejarah Kota Maritim Makassar Abad Ke-19 Sampai Dengan 20, Dalam Muklis Paeni. Persepsi Sejarah Kawasan Pantai. Ujung Pandang: P3MP Universitas Hasanuddin. 1989. Hlm 21.

Sidenreng, bekas wilayah Bone yang diserahkan kepada Suppa.²⁷ Sejak itu, Sidenreng memungut bea keluar dan masuk di pelabuhan Pare-Pare.²⁸

Belanda mengakui lokasinya yang strategis sebagai pelabuhan yang dilindungi pulau lepas pantai dan memang sudah menarik banyak pengunjung. Mereka pertama kali menaklukkan tempat ini dan kemudian menjadikannya kota terpenting di tengah Sulawesi Selatan. Di sini Belanda beroperasi melebarkan sayapnya dan menyerbu seluruh wilayah timur dan utara Sulawesi Selatan.

Menurut sejarah, terbentuknya kota Pare-pare melalui proses sejarah yang sangat panjang. Hal ini dapat kita telusuri kembali ke masa ketika Gubernur H.N.A. Swart (Agustus 1906 - Mei 1908) terpilih menjadi gubernur mengganti C.A.Kroesen (1903-1906), sebagai kepala pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan. Swart adalah anggota infanteri militer dan berpangkat letnan kolonel sebagai gubernur pada saat dikukuhkannya. Bentuk pemerintahan yang diperkenalkan pada masa pemerintahannya adalah pemerintahan sipil-militer berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 6 Juli 1906.²⁹

Berdasarkan surat keputusan jenderal Belanda H.N.A. Swart tanggal 31 Desember 1906 membagi Wilayah Administratif Sulawesi Selatan dan Wilayah

²⁷ Latif, Para Penguasa Ajatappareng. Ombak. Yogyakarta. 2014. Hlm 155. Lihat Pula Dalam Arsip Nasional Republik Indonesia Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 5 Iktisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848. Jakarta 1973. Hlm. 278.

²⁸ Latif, Para Penguasa Ajatappareng. Ombak. Yogyakarta. 2014. Hlm 155. Lihat Pula Dalam Arsip Nasional Republik Indonesia Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 5 Iktisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848. Jakarta 1973. Hlm. 231.

²⁹ Mattulada, Kuasa Penjajah: Imprealisme Belanda Di Kerajaan Bone 1906-1931, (Makassar; Pustaka Sawerigading, 2015), Hlm. 80.

Taklukkan menjadi tujuh bagian Wilayah Administratif Afdeeling pada periode 1906-1916. Wilayah administratif Afdeeling adalah Afdeeling di Pare-pare di Pare-pare, Afdeeling Luwu di Luwu, Afdeeling Bone di Bone, Afdeeling Bantaeng di Bantaeng, Afdeeling Mandar di Majene, dan Afdeeling Buton dan Laiwui di Baubau.³⁰

Pemerintah Hindia Belanda mulai menguasai dan menaklukkan beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Setelah dikuasai penguasa setempat di Pare-Pare, pemerintah Hindia Belanda menjadikan Pare-Pare sebagai kota penting di bagian tengah Sulawesi Selatan di wilayah Ajattappareng.³¹

Selain itu, *Staadblad* No. 352 Tahun 1916 mengatur daerah Afdeling-Parepare penamaan Parepare sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda yang menguasai beberapa wilayah Onderafdeeling diantaranya: Onderafdeeling Parepare beribukotakan Parepare dan wilayahnya meliputi Kerajaan Mallusetas dan Kerajaan Suppa, Onderafdeeling Barru beribukotakan Barru dan wilayahnya meliputi Kerajaan Tanete, Kerajaan Barru dan Kerajaan Sopeng Riaja, Onderafdeeling Sidenreng Rappang beribukotakan Rappang dan wilayahnya meliputi Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang, Onderafdeling Pinrang dengan ibu kota Pinrang dan wilayahnya, antara lain Kerajaan Sawitto, Kerajaan Batulappa, dan Kerajaan Kassa, Onderafdeeling Enrekang dan wilayahnya

³⁰ Limbugau. *Perjalanan Sejarah Kota Maritim Makassar Abad Ke-19 Sampai Dengan 20*, Dalam Muklis Paeni. *Persepsi Sejarah Kawasan Pantai*. Ujung Pandang: P3MP Universitas Hasanuddin. 1989. Hlm 24.

³¹ Mutawakkil, *Kota Parepare 1960-2000 (Profil Kota Kecil Dan Perkembangannya)*, Makassar. Tesis Pasca Sarjana UNM, Makassar. 2001, Hlm. 47.

beribukotakan Enrekang, antara lain Kerajaan Maiwa, Kerajaan Alla, Kerajaan Malua dan Kerajaan Buntu Batu.³²

Untuk melaksanakan pemerintahan, Gubernur Swart mengangkat kepala pemimpin pemerintahan dan cabang pemerintahan (Afdeeling dan Onderafdeeling) sebagai kepala pemerintahan di daerah kekuasaannya masing-masing.³³

Setiap wilayah Onderafdeeling diurus oleh seorang pengawas yang merupakan utusan pemerintah Hindia Belanda untuk daerah tersebut dan mengawasi kegiatan pemerintahan daerah. Selain pejabat pemerintah Hindia Belanda, ada juga pejabat pemerintah daerah yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan, seperti Arung Barru, Addatuang Sidenreng, Addatuang Sawitto, Arung Enrekang, dan Arung Mallusetasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah raja-raja yang kalah memberontak, memberi mereka dan pemimpin tradisional mereka kekuasaan untuk mengatur bidang-bidang pemerintahan yaitu peradilan, kepolisian, keuangan dan kesejahteraan rakyat.

Daerah Mallusetasi adalah daerah yang menyatukan kerajaan Soreang, Bacukiki, Bojo dan Nepo dengan raja pertama mereka, Arung Nepo (Andi Sima' Tana). Pemerintah kolonial Hindia Belanda menjadikan Kerajaan Mallusetai

³² Agussalim, Kotamadya Pare-Pare Pada Masa Pemerintahan H. Mirdin Kasim 1988-1993, (Makassar; Skripsi Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, 2000). Hlm. 54.

³³ Mattulada, Kuasa Penjajah: Imprealisme Belanda Di Kerajaan Bone 1906-1931, (Makassar; Pustaka Sawerigading, 2015). Hlm. 81.

sebagai Zelfbestuur Mallusetasi, yang terbagi menjadi tiga distrik yaitu distrik Soreang, distrik Bacukiki dan distrik Bojo dan Nepo.³⁴

Struktur pemerintahan ini ada sampai pecahnya Perang Dunia II, yang menghapuskan pemerintahan Hindia Belanda sepenuhnya pada tahun 1942 dan digantikan oleh pemerintah Jepang. Ketika pertama kali datang, Jepang diterima dengan sangat positif oleh masyarakat, karena Jepang seharusnya sudah merdeka dan membebaskannya dari penjajahan Belanda yang telah menimbulkan kehancuran jangka panjang. Sikap baik Jepang berhasil mengelabui seluruh rakyatnya sehingga memungkinkan pemerintah Jepang mendirikan kantor pemerintahan yang setara dengan jabatan gubernur pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang dikenal dengan nama Minshibu.³⁵ setelah Jepang melakukan Perang Pasifik dan berhasil mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan. Tahun ini ditandai dengan penyerahan tanpa syarat pemerintah Hindia Belanda kepada tentara Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati (Jawa Barat). Ketika Jepang mulai menguasai Indonesia, tidak semua tradisi sistem pemerintahan yang terbentuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda serta merta berubah, melainkan hanya pada istilah jabatan yang tadinya pada masa pemerintahan Hindia

³⁴ Asba, Kerajaan Nepo, Ombak. Yogyakarta. 2010. Hlm.39.

³⁵ Agussalim, Kotamadya Pare-Pare Pada Masa Pemerintahan H. Mirdin Kasim 1988-1993, (Makassar; Skripsi Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, 2000), Hlm. 56.

Belanda. hanya mengadaptasi Bahasa Jepang pimpinan pemerintah bergelar Asisten Residen menjadi Ken Karikan dan Countoleur menjadi Bunken Karikan.³⁶

Menurut sistem pemerintahan yang diperkenalkan oleh pemerintah Belanda sebelumnya, pemerintah Jepang membagi wilayah Sulawesi Selatan menjadi enam wilayah administratif kecil yang disebut Ken-Karikan, dan masing-masing wilayah tersebut dikepalai oleh seorang Karikan Jepang. Keenam wilayah Ken Karikan tersebut adalah: Makassar Ken-Karikan dengan ibu kotanya Makassar dan wilayahnya yang meliputi Gowa, Maros, Pangkajene serta pulau Takalar dan Jeneponto. Parepare Ken-Karikan dengan ibu kotanya Parepare dan sekitarnya meliputi Barru, Sidenreng Rappang, Pinrang dan Enrekang. Luwu Ken-Karika dengan ibukotanya Palopo dan wilayahnya meliputi Masamba, Malili, Makale dan Rantepao. Bone Ken-Karika dengan ibukota di Wattampone dan wilayahnya meliputi Bone, Soppeng dan Wajo. Mandar Ken-Karika dengan ibu kota Majene dan wilayahnya meliputi Majene, Polewali Mamasa dan Mamuju. Bantaeng Ken-Karikan dengan ibu kotanya meliputi Bantaeng, Sinjai Selayar dan Bulukumba.³⁷

kemudian untuk wilayah Pare-Pare, Afdeeling diubah menjadi Kanrikan dipimpin oleh Ken Karikan sedangkan Onderafdeeling diubah menjadi Bunke Kanrikan. Ken Karikan Pare-Pare terletak di Pare-Pare yang wilayahnya meliputi Sidenreng Rappang, Pinrang, Barru dan Enrekang. Struktur pemerintahan Jepang

³⁶ Muh.Said, Migrasi Orang Enrekang Ke Parepare 1950-1965. (Parepare: Institute, 2019), Hlm. 51.

³⁷ Agussalim, Kotamadya Pare-Pare Pada Masa Pemerintahan H. Mirdin Kasim 1988-1993, (Makassar; Skripsi Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, 2000), Hlm. 58.

tersebut berakhir dengan kembalinya sekutu ke Indonesia dan kekalahan Jepang sebagai penguasa.

Ketika pemerintah Jepang berhasil menata struktur pemerintahannya di Indonesia, terkhusus di Sulawesi Selatan seperti diuraikan di atas, maka pada tahun 1944 pemerintah Jepang mengangkat salah seorang bangsawan pribumi, La Temmasonge Abdullah Bau Massepe, sebagai kepala daerah Parepare menggantikan Bunkenkarikan Parepare. Pada saat itu Temmasonge Abdullah Bau Massepe juga aktif di Kerajaan Datu Suppa saat pemerintah Jepang menjadikan Suppa sebagai sub-wilayah Parepare saat itu. Pada tahun 1945, pemerintah Jepang mengangkat La Temmasonge Abdullah Bau Massepe sebagai kenkarikan, jabatan yang disebut petoro besar pada masa pemerintahan Belanda.³⁸

Ketika Jepang menyadari posisinya yang semakin terpuruk, pemerintah Jepang membentuk organisasi dengan penguasa pribumi, Seinendan dan Heiho, namun tidak ada yang bisa menyelamatkan Jepang dari kekalahan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan kealahannya terhadap pasukan Sekutu dan Indonesia menggunakan kesempatan tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Menjelang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, nasionalisme begitu kuat di masyarakat sehingga segala sesuatu yang menyerupai kolonialisme harus diawasi, karena masalah yang berkaitan dengan kolonialisme membangkitkan kenangan pahit. Sistem dan model pemerintahan kota pada masa itu disesuaikan

³⁸ Latif, Para Penguasa Ajatappareng. Ombak. Yogyakarta. 2014. Hlm 244-245.

dengan kondisi kemerdekaan.³⁹ Sebagai susunan pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 (Komite Nasional Indonesia). Parepare kembali menjadi pusat pemerintahan yang dipimpin Residen. Residen Parepare kemudian menguasai Kewedanan dan distrik (desa/kampong). sementara di sisi lain pemerintahan kerajaan tetap bertahan. Kerajaan Mallusetasi dipimpin oleh Andi Abdullah Bau Massepe dan Kerajaan Suppa dipimpin oleh Andi Makkasau. Lebih jauh ke depan, Parepare terbagi menjadi tiga distrik: Soreang, Bacukiki dan Nepo (Mallusetasi). Kemudian di bawah kawasan itu terdapat struktur pemerintahan kerajaan yang disebut Matowa, termasuk Matowa Labukkang. Setelah reorganisasi struktur pemerintahan Parepare, kekacauan kembali terjadi pada tahun 1946, yang dilakukan oleh tentara NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*), yang terdiri dari tentara Belanda. Pembantaian brutal tentara NICA pada bulan Desember mengakibatkan banyak korban yang tidak bersalah. Di antara para korban, Andi Abdullah Bau Massepe dan Andi Makkasau adalah dua dari sekian banyak tokoh masyarakat Parepare yang tewas dalam pertempuran melawan pasukan Ratu Adil (APRA) yang dipimpin oleh Raymond Westerling.⁴⁰ Masa ini dikenal sebagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa Revolusi Fisik untuk mempertahankan bekas wilayah Belanda.

Seiring berkembangnya kehidupan bangsa yang merdeka, demikian pula Parepare mengikutinya. Pada tahun 1948, pemerintah Indonesia mencanangkan

³⁹ Basundoro, Pengantar Sejarah Kota. Yogyakarta: Ombak. 2016. Hlm. 92.

⁴⁰ Pemerintah daerah Kota Parepare, *Parepare Kota Bersahaja*, (Parepare: Pemerintah Kota Parepare, 1993). Hlm. 6.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 22, yang juga mengubah struktur pemerintahan, yaitu di daerah-daerah hanya ada kepala daerah atau kepala negara (KPN) dan tidak ada lagi asisten residen atau Ken Karikan seperti pada Pemerintah Hindia Belanda dan Jepang. Struktur administrasi ini juga berlaku untuk daerah seperti Pinrang, Sidenreng Rappang, Enrekang, Barru dan Parepare.⁴¹

Saat itu status Parepare tetap sebagai Afdeling yang wilayahnya masih meliputi lima kecamatan karena Keputusan Pemerintah No. 34 tanggal 12 Agustus 1952 tentang pembentukan daerah otonom. Semua bentuk pemerintahan tetap berjalan hingga terbitnya Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan dan Pembagian Daerah Tingkat II di Propinsi Sulawesi Selatan, hampir seluruh wilayah Onderafdeling kemudian menjadi kabupaten/kota administratif Tingkat II, kemudian kelima Onderafdeling tersebut menjadi Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang, sedangkan Pare-pare sendiri berstatus kota praja tingkat II.⁴²

Saat berdirinya kongregasi Parepare pada tanggal 12 November 1959,⁴³ kondisi Parepare sangat kritis. Walikota pertama Parepare saat itu, H. Andi Mannaungi, menghadapi situasi yang sangat tidak memadai, tidak teratur dan tidak aman. Dari sisi pendapatan keuangan, H Andi Mannaungi hanya mengandalkan

⁴¹ Pemerintah Daerah, Undang-Undang Pokok No.22 Tahun 1948 Tentang Pemerintah Daerah.

⁴² Muh.Said, Migrasi Orang Enrekang Ke Parepare 1950-1965. (Parepare: Institute, 2019). Hlm. 51.

⁴³ Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Volume I, Periode Tahun 1889-1981. No. Reg. 643 Mengenai Laporan Tahunan Keadaan Kotapraja Pare-Pare.

pajak pendapatan daerah (Ipeda) dan pajak pembangunan untuk memenuhi semua kebutuhan Parepare yang belakangan menjadi daerah otonom.⁴⁴

Pare-pare adalah sebuah daerah di Sulawesi Selatan, sekitar 155 kilometer sebelah utara kota Makassar, pusat pemerintahan Belanda. Panjang jalan raya di kawasan parepare ibu kota Afdeeling ini adalah 1,3 kilometer. Pare-pare juga merupakan kota yang pelabuhannya memiliki potensi besar untuk mendukung perdagangan dan pelayaran di Indonesia Timur.⁴⁵

Letak strategis ini merupakan salah satu modal penting bagi perkembangan Pare-Pare sebagai kota pelabuhan dan niaga. Pada tahun 1930-an, pelabuhan Pare-Pare disesaki kapal dan menjadi salah satu jalur perdagangan kopra dan beras daerah. di Pare-Pare dibentuk Jalur kecil (disebut Jalur 13), melalui Donggala, Pare-Pare dan Makassar ke pantai timur Kalimantan, Samarinda dan Balikpapan untuk mengangkut beras dan kopra.⁴⁶

Namun kemudian, pada tahun 1963 istilah Kota Praja Parepare diganti menjadi Kotamadya Pare-pare, dan setelah adanya UU No. 2 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka istilah Kotamadya kembali diubah menjadi Kota Pare-pare dan istilah tersebut masih berlaku hingga sekarang.

⁴⁴ Budiman & Prastowo, Kota-Kota Sulawesi. (Jakarta: The Interseksi Foundation.2016), Hlm. 361.

⁴⁵ Mehawati, Kotamadya Pare-Pare Pada Masa Pemerintahan H. Andi Mannaungi 1960-1965. (Makassar, Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin 1992). Hlm. 12.

⁴⁶ Abdul Rasyid Asba, Kopra Makassar Perebutan Pusat Dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik Dan Regional Di Indonesia. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.2007. Hlm.101.

2.3.Asal usul penduduk Parepare

Kawasan Bacukiki yang tidak lebih dari bagian kota Parepare ini sangat terkenal di Nusantara pada abad ke-16 karena pelabuhannya yang sering dikunjungi oleh para pedagang dari seluruh dunia dan menjadi rebutan kerajaan-kerajaan di Sulawesi. Sebelumnya, di bawah kekuasaan Kerajaan Siang (Pangkajene), Pelabuhan Bacukiki tumbuh dan berkembang menjadi pelabuhan besar. Parepare dikenal tidak hanya sebagai kota transit di jalur persimpangan Sulawesi Selatan, tetapi juga sebagai kota seribu satu malam karena merupakan rumah bagi orang-orang dari berbagai etnis seperti Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa selain suku Sulawesi Selatan yang telah disebutkan di atas, masih terdapat suku asing lainnya yang tinggal di Kota Parepare, seperti Tionghoa, Arab, dan Eropa. Kedatangan mereka di Parepare pada abad ke-17 disebabkan oleh pelayaran dan perdagangan pada umumnya, sehingga hanya sedikit dari mereka yang menetap dan berbaur dengan penduduk setempat.⁴⁷

Keberadaan orang asing tersebut di Kota Parepare menimbulkan kontak sosial baik secara horizontal maupun vertikal. Kelompok sosial bukanlah kelompok yang dapat hidup secara statis, tetapi kelompok ini berusaha untuk berkembang membawa perubahan dari waktu ke waktu dalam segala aktivitasnya. selain itu,

⁴⁷ Muh.Said, Migrasi Orang Enrekang Ke Parepare 1950-1965. (Parepare: Institute, 2019), Him. 48.

orang-orang asing tersebut senantiasa menjaga hubungan mereka dengan para penguasa pribumi agar tetap harmonis.⁴⁸

Penduduk Parepare sebenarnya terus bertambah baik karena pertumbuhan penduduk kota Parepare maupun migrasi dari daerah sekitar kota Parepare, terutama antara tahun 1950 dan 1965 dimana masa gerombolan DI/TII. Pada tahun 1962 jumlah penduduk Kota Parepare yang terbagi menjadi tiga kecamatan adalah 66.562 jiwa, menurut laporan Pemerintah Kota Parepare di daerah Soreang (24.117) jiwa Wilayah Ujung (22.720) dan Wilayah Bakukiki (19.726).⁴⁹

Seperti yang kita tahu, Kota Parepare merupakan daerah yang minim sumber daya alam, baik itu minyak, tambang atau sumber daya alam lainnya. Namun, kota Parepare mampu memperdagangkan semua sumber daya alam tersebut dengan bantuan pelabuhannya, sehingga sebagian besar masyarakat Parepare bekerja sebagai pedagang.⁵⁰ Sejak tahun 1959 hingga tahun 1965, Kota Parepare memiliki beberapa pelabuhan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu Pelabuhan Nusantara yang berfungsi sebagai pelabuhan kapal penumpang, Pelabuhan Cappa Ujung yang berfungsi sebagai pelabuhan bongkar muat barang, dan Pelabuhan Longtangge yang berfungsi sebagai pelabuhan tempat berlabuhnya kapal nelayan.

⁴⁸ Herman, Penggilingan Padi Di Wilayah Parepare 1950-1965, (Makassar; Skripsi Depaertemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, 2017), Hlm. 27.

⁴⁹ Pemerintah daerah Kota Parepare, Arsip Statis Pemerintah Daerah Kotamadya Parepare, Volume 1, Periode Tahun 1889-1981. No. Reg. 643 Mengenai Laporan Tahunan Keadaan Kotapraja Parepare.

⁵⁰ Pemerintah daerah Kota Parepare, Arsip Pemerintah Daerah Kota Parepare Volume I Tahun 1889-1981. No.Reg. 1919 Walikota Kepala Daerah Kotapraja Parepare: Pola Potensi Daerah Kotapraja Parepare Tahun 1963.

Dan karena kota parepare terletak di sebelah barat selat makassar maka warga parepare memanfaatkan kondisi ini dengan menjalankan profesinya sebagai nelayan (nelayan), profesi yang juga paling sering ditekuninya di Kota Parepare adalah petani hal ini disebabkan topografi wilayah perkotaan. 85% wilayah Parepare merupakan tanah berbukit dan subur. Selain pekerjaan tersebut, beberapa masyarakat juga bekerja di aparatur negara (TNI/Polri) dan sebagai pegawai pemerintah daerah.⁵¹

Selain memiliki suku dan masyarakat yang berbeda di Parepare, penduduk Parepare juga menganut kepercayaan yang berbeda-beda seperti Islam, Kristen Protestan dan Katholik, Hindu dan Budha. Kota Parepare yang majemuk secara etnik telah menghasilkan keragaman budaya yang luar biasa melalui interaksi sosial.⁵²

Interaksi sosial itu sendiri adalah suatu proses di mana orang-orang yang berkomunikasi mempengaruhi pikiran dan tindakan satu sama lain. Kohesi dan keharmonisan masyarakat yang dibangun masyarakat pendatang yang tinggal di kota Parepare dengan penduduk asli kota Parepare mempengaruhi munculnya kesadaran kolektif masyarakat. Hal ini nampaknya terjadi saat warga berduka,

⁵¹ Pemerintah daerah Kota Parepare, Arsip Pemerintah Daerah Kota Parepare Volume I Tahun 1889-1981. No.Reg. 1919 Walikota Kepala Daerah Kotapraja Parepare: Pola Potensi Daerah Kotapraja Parepare Tahun 1963.

⁵² Liliany, *Pasar Lakessi Parepare 1956-1965*, Makassar, Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Hlm. 23.

kemudian warga lainnya pun turut hadir dalam pemakaman tanpa diundang untuk memberikan pertolongan dan bantuan lainnya.⁵³

2.4.Perkembangan Kristen di Indonesia

Kehidupan hari ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masa lalu. Dibalik setiap peristiwa kehidupan saat ini selalu ada cerita, selalu diwarnai manisnya pahitnya kehidupan. Ini berlaku untuk semua bidang kehidupan, termasuk sejarah gereja. Thomas Van Den End mengatakan bahwa sejarah gereja adalah sejarah perkembangan dan perubahan yang dialami gereja selama berada di dunia ini, yaitu sejarah pergumulan antara Injil dan bentuk-bentuk yang digunakan untuk mengungkapkan Injil.⁵⁴

Selain masalah teologi, umat Katolik dan Protestan di Eropa selalu berdebat tentang masalah politik dan ekonomi. Pada saat itu, Belanda dengan mayoritas Protestannya bertindak sebagai perantara perdagangan Portugis ke Eropa utara, tetapi umat Katolik Spanyol melawan dan mempertahankan Belanda sebagai wilayah jajahannya. Ketika Kerajaan Katolik Prancis, dalam Perdamaian Westphalia tahun 1648 M, merasa posisinya di bawah tekanan dari dinasti Habsburg yang mencoba melemahkan kekuatan Kerajaan Katolik Spanyol dan Kerajaan Katolik Jerman, negara Protestan Belanda dan Switzerland diuntungkan untuk menjadi negara merdeka. Dan sementara Perang Tiga Puluh Tahun belum berakhir, Belanda berhasil menemukan jalan ke Indonesia dan Amerika, dimana

⁵³ Muh.Said, *Migrasi Orang Enrekang Ke Parepare 1950-1965*, (Parepare: Sampan Institute, 2019), Hlm. 62-63.

⁵⁴ End, *Harta Dalam Bejana*, (Jakarta : Gunung Mulia, 2011), Hlm.1.

pada tahun 1602 Masehi. Belanda mendirikan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Dengan nama lembaga perdagangan VOC, Belanda mengembangkan negaranya menjadi Republik Belanda Serikat, yang kemudian menjadi Kerajaan Protestan Belanda, yang gubernur jenderal pertamanya di pulau Jawa adalah J.P. Dulu Coen.⁵⁵

Tahun 1602, pemerintah Belanda mendukung dan mempersenjatai Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), yaitu kongsi dagang Belanda, dan juga berhasil mengubah sebagian besar umat Katolik menjadi Protestan, kecuali Flores dan Timor Timur (sekarang: Timor Leste). Pada masa pemerintahan VOC, umat Katolik dipaksa menjadi Protestan karena saat siapa pemilik negara maka ialah pemilik agama.⁵⁶ Perhatikan penggunaan senjata yang digunakan tidak hanya oleh Belanda, tetapi juga oleh Portugis dan Spanyol dalam menjalankan monopoli perdagangan mereka, yang pada saat yang sama juga melindungi penginjil dalam Kristenisasi masyarakat lokal Indonesia.⁵⁷ VOC melakukan Protestantisasi karena persekutuan bisnis Belanda mendapat mandat dari Gereja Gereformeerde Belanda, sebuah gereja Protestan yang bercorak Calvinis, untuk menyebarkan agama Kristen (Protestan) di wilayah jajahannya, menurut Pasal 36 Pengakuan iman Belanda

⁵⁵ Suryanegara, *Api Sejarah 1: Mahakarya Perjuangan Ulama Dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Bandung: Surya Dinasti, 2015), Hlm. 163.

⁵⁶ Batlajery & End, *Ecclesia Reformata Semper Reformanda: Dua Belas Tulisan Mengenai Calvin Dan Calvinisme*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), Hlm. 51.

⁵⁷ Culver, *Sejarah Gereja Indonesia*, (Bandung: Biji Sesawi, 2014), Hlm. 29.

(Confessio Belgica)⁵⁸ pemerintah menekankan: "Itu juga termasuk memelihara pelayanan gereja suci, membasmi dan menghancurkan semua penyembahan berhala dan agama palsu, mengalahkan kerajaan Antikristus dan mengupayakan pertumbuhan kerajaan Yesus Kristus untuk memastikan bahwa firman Injil menyebar ke mana-mana." sehingga setiap orang dapat menghormati dan melayani Tuhan seperti yang diperintahkan oleh Firman-Nya".⁵⁹

Konsep kebebasan beragama yang dibawa oleh Revolusi Prancis (1789), yaitu adanya kebebasan dalam praktik kekristenan, kemudian mempengaruhi badan-badan penginjilan yang datang ke Indonesia. Untuk alasan keamanan, pemerintah kolonial membatasi lembaga yang bergerak dalam penginjilan dengan mendirikan satu lembaga di setiap daerah. Pada tahun 1814 tiga orang datang ke Indonesia dari lembaga pekabaran Injil Belanda, mereka dikirim ke Indonesia melalui Genootschap misionaris London, dan salah satunya, Gottlob Bruckner, bekerja di Semarang dan menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jawa. Joseph Kam, yang kemudian diberi gelar Rasul Maluku, mengorganisir penginjilan di Maluku hingga di wilayah Sulawesi Utara. Sebagian besar lembaga pekabaran Injil memiliki latar belakang Pietisme, cabang agama Kristen yang

⁵⁸ Aritonang, *Berbagai Aliran Di Dalam Dan Di Sekitar Gereja*, Edisi Revisi, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), Hlm. 13-14.

⁵⁹ Batlajery & End, *Ecclesia Reformata Semper Reformanda: Dua Belas Tulisan Mengenai Calvin Dan Calvinisme*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), Hlm. 51.

muncul di gereja-gereja Eropa pada akhir abad ke-17 dan menjadi faktor penting dalam kebangkitan melakukan pekabaran Injil pada abad-abad berikutnya.⁶⁰

Meskipun ada beberapa penginjil yang melakukan perjalanan ke Indonesia dalam semangat pietisme selama masa VOC, VOC menolak kehadiran mereka karena takut memberontak terhadap VOC. VOC mengambil sikap itu karena kaum injili adalah orang-orang bebas, tidak terikat atau tunduk pada kekuasaan negara, baik di Eropa maupun di daerah jajahan. Pada tanggal 1 Januari 1800, pemerintah kolonial Hindia Belanda akhirnya mencabut kekuasaan dari VOC ketika VOC bangkrut. Meski pada dasarnya netral terhadap agama, pemerintah Belanda menyesuaikan diri dengan semangat Pencerahan (Aufklärung) yang muncul dan berkembang di Eropa sejak abad ke-18. Nyatanya, Raja Willem I dari Belanda merasa berhak untuk menempatkan satu gereja (Protestan) di bawah otoritas negara, sehingga menghilangkan semua perselisihan antar gereja, yang dampaknya akhirnya terbukti dengan pendiriannya pada tahun 1815. Perhimpunan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), yang jemaatnya tumbuh melalui warisan VOC dan termasuk Kristen aliran Lutheran dan denominasi Kristen lainnya yang telah ada di Indonesia sejak awal.⁶¹

Aliran Kristen lainnya, seperti Calvinisme, masuk ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur gereja negara (sejak 1605) dan jalur lembaga misionaris (sejak

⁶⁰ Ngelow, *Kekristenan Dan Nasionalisme: Perjumpaan Umat Kristen Protestan Dengan Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1950*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), Hlm. 18-19.

⁶¹ Aritonang, *Berbagai Aliran Di Dalam Dan Di Sekitar Gereja*, Edisi Revisi, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), Hlm. 15-16.

1814). Hanya kebaktian keagamaan yang diizinkan di koloni VOC di Indonesia, dan sejak 1743 sekte Kristen Lutheran di Batavia mendapat izin untuk membangun gereja dan mengadakan kebaktian. Namun, umat Kristiani Katolik tidak merasakan kondisi tersebut ketika mereka memperoleh kebebasan beragama, justru mendapat kontrol ketat dari VOC. Di zaman VOC, semua biaya gereja ditanggung, mulai dari biaya perjalanan pendeta hingga gajinya yang dibayar mahal. Demi kebaikan VOC yang diterima gereja, gereja harus mengembalikan sesuatu dengan melayani kepentingan VOC, bahkan semua kepentingan dan masalah yang timbul di dalam gereja, semuanya harus disetujui oleh VOC. Sebagai bentuk pengabdian kepada VOC, gereja harus mengadakan kebaktian syukur ketika VOC memenangkan perang.⁶²

Hubungan erat antara Gereja Protestan dan Hindia Belanda mempengaruhi warna dan arah gereja, tidak seperti VOC, Hindia Belanda yang netral tidak lagi tertarik untuk diakui. Ketika agama Katolik berada di bawah VOC semuanya berada di bawah kendali ketat, namun ketika Kerajaan Belanda mengambil alih VOC justru memberikan pengaruh yang lebih baik bagi kelangsungan pekerjaan misionaris (penyebaran agama) yang dilakukan oleh umat Katolik, terutama pada masa itu. Telah terjadi perubahan di Eropa, yaitu Prancis menduduki Belanda. Ketika pemerintah kolonial Belanda tidak lagi mengakui gereja atau agama tertentu, umat Katolik yang selama dua abad dilarang masuk ke Indonesia akhirnya bisa

⁶² Batlajery & End, *Ecclesia Reformata Semper Reformanda: Dua Belas Tulisan Mengenai Calvin Dan Calvinisme*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), Hlm. 129-130.

kembali ke wilayah kolonial Belanda, yaitu Indonesia.⁶³ Warna-warni corak kehidupan mewarnai perjalanan kehidupannya. Seiring dengan waktu yang berlalu, telah banyak pula konteks yang “dilalui”; *entah* waktu atau teritori, pun tantangan yang melahirkan harapan, semua mengalun dalam nyanyian sejarah gerejawi.

Beberapa ahli, seperti Johannes van der Ven atau G. Heitink, kurang lebih senada dalam menyebutkan konteks umum yang dihidupi dan dihadapi oleh gereja saat ini: modernitas.⁶⁴ Konteks modern⁶⁵ ini ditandai oleh beberapa ciri-ciri seperti maraknya industrialisasi, urbanisasi, individualisasi, dan juga globalisasi.⁶⁶ Batas-batas antar konteks menjadi samar, dan kecanggihan teknologi membawa manusia kepada pembentukan komunitas global.⁶⁷ Maka itu ciri-ciri konteks itu juga tampak

⁶³ Batlajery & End, *Ecclesia Reformata Semper Reformanda: Dua Belas Tulisan Mengenai Calvin Dan Calvinisme*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), Hlm. 62.

⁶⁴ Ven, *Ecclesiology In Context*, Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co., 1993, Hal. 5-15; Juga G. Heitink, *Teologi Praktis – Pastoral Dalam Era Modernitas-Postmodernitas*, Yogyakarta: Kanisius, 1999, Hal. 54-57.

⁶⁵ Saat Ini Lazimnya Dibedakan Antara Zaman Modern Dengan Zaman Post-Modern. Zaman Modern Berawal Paska Masa Pencerahan (*Renaissance*) Yang Ditandai Dengan Penekanan Yang Kuat Akan Rasio Dan Juga Pencarian Dan Keyakinan Akan Adanya Sebuah Kebenaran Tunggal Dan Universal. Sementara Itu Postmodern Mulai Muncul Di Akhir Abad 20 Yang Ditandai Dengan Ciri-Ciri Penghargaan Yang Tinggi Kepada Subjektivitas Dan Keyakinan Atau Paham Bahwa Kebenaran Itu Sifatnya Parsial, Dan Bukan Universal. Lih. E. G. Singgih, *Dari Israel Ke Asia: Masalah Hubungan Antara Kontekstualisasi Teologi Dengan Interpretasi Alkitabiah*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, Hal. 151-152. Dalam Tulisan Ini, Saya “Terpaksa” Tidak Akan Terlalu Membahas Mengenai Perbedaan Antara 2 Istilah Ini.

⁶⁶ Kooij & Dkk., *Menguak Fakta, Menata Karya Nyata: Sumbangan Teologi Praktis Dalam Pencarian Model Pembangunan Jemaat Kontekstual*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007. Hml. 2-3.

⁶⁷ Cole. *Church 3.0: Upgrades For The Future Of The Church*. San Fransisco: Jossey Bass, 2010, Hlm. 18-19.

di dalam kehidupan gereja Asia, yang di dalamnya juga terjadi arus perubahan yang cepat dalam berbagai bidang kehidupan.⁶⁸

Pergerakan zaman yang cepat ini menuntut dilakukannya perubahan dan inovasi-inovasi yang tiada henti agar dapat tetap eksis di dunia yang “keras” ini. Tuntutan itu, tentu saja, juga berlaku kepada gereja.⁶⁹ Dalam konteks seperti ini, Neil Cole menyampaikan pernyataan yang, bersifat reflektif (atau sarkastis), demikian: *(Mungkin institusi yang paling lambat berubah adalah gereja. Kami dikenal karena penolakan terhadap perubahan)*.⁷⁰

Pendapat Cole di atas menunjukkan betapa adanya tuntutan yang tinggi kepada gereja agar ia dapat berubah. Gereja perlu mencari cara yang tepat mengenai keberadaannya di dunia ini.⁷¹ Inilah persoalan relevansi, yaitu soal bagaimana gereja bisa menjadi relevan di dalam kehidupan saat ini. Sehingga gereja tidak sekedar larut dalam konsep-konsep normatif teologis yang cenderung abstrak, namun mencari bagaimana konsep teologis itu bisa mendorong gereja untuk menjadi relevan. Harun Hadiwiyono menyinggung mengenai konsep teologi Jurgen Moltmann, yang ia sebut sebagai Teologi Politik, artinya “sebuah teologi yang

⁶⁸ Maitimoe, *Pembangunan Jemaat Missioner*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1978, Hlm. 20-21.

⁶⁹ Singgih, *Teologi Dalam Konteks III*, Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 2002, Hlm. 22.

⁷⁰ Cole. *Church 3.0: Upgrades For The Future Of The Church*. San Fransisco: Jossey Bass, 2010, Hlm. 16.

⁷¹ Maitimoe, *Pembangunan Jemaat Misioner*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1978). Hlm. 22.

benar-benar menciptakan praktik dan pemenuhan misi Kristus di dunia ini ”.⁷² Ini menunjukkan bahwa ada tanggung jawab agar teologi maupun gereja bisa berperan nyata di dalam kehidupan sosial politik di dalam masyarakat.

Akan tetapi yang kemudian perlu disadari adalah bahwa ketika gereja diperhadapkan kepada “kenyataan” akan tanggung jawabnya untuk menjadi relevan, pada saat yang sama gereja juga larut kepada persoalan lain yaitu perihal *identitas* dirinya. Ada ketegangan dan krisis di sini, yaitu krisis relevansi dan krisis identitas.⁷³

Ketika gereja berusaha menjalankan tanggung jawabnya untuk menjadi relevan bagi dunia ini, acap kali gereja justru kebingungan dengan identitasnya. Upaya untuk menjadi relevan itu membawa gereja kepada perjumpaan dengan yang lain (sang liyan). Akan tetapi perjumpaan-perjumpaan ini, dengan konteks yang begitu luas dan beragam sekaligus menyajikan rupa-rupa identitas yang ada di dalamnya, sering membuat gereja bingung dan kesulitan “mendefinisikan” mengenai siapa, apa, dan bagaimana identitas dirinya.

Di sisi lain, ketika gereja hanya memfokuskan diri kepada pembentukan identitasnya, yang terjadi justru gereja lupa akan tanggung jawabnya untuk bisa menjadi relevan. Ini dikarenakan gereja justru terjebak kepada persoalan-persoalan yang sifatnya hanya ke dalam tubuh gereja, seperti persoalan dogma atau tradisi gereja.

⁷² Hadiwijono, *Teologi Reformatoris Abad Ke 20* (Jakarta: Gunung. Mulia, 1993), Hlm. 145-146.

⁷³ Hadiwijono, *Teologi Reformatoris Abad Ke 20* (Jakarta: Gunung. Mulia, 1993), Hlm. 142.

Lebih lanjut Jan Hendriks menunjukkan bahwa konsep identitas merupakan salah satu dari 5 faktor utama dalam upaya pembentukan (pembangunan) jemaat yang vital dan menarik, yang tentunya juga relevan.⁷⁴ Hendriks mengatakan bahwa organisasi atau gereja yang memiliki sebuah konsepsi identitas yang jelas akan menjadi lebih menarik dan akan membawa hal yang positif dalam vitalitas organisasi dibanding dengan yang tidak memiliki konsepsi identitas yang jelas.⁷⁵ Hendriks bahkan menyebutnya sebagai “batu sendi atau batu penutup organisasi” karena pengertian identitas ini sangat dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor lain.⁷⁶

Pemaparan-pemaparan di atas menunjukkan betapa pentingnya gereja, termasuk gereja Asia, memiliki konsepsi identitas yang jelas tentang dirinya. Hal ini tentunya juga berlaku bagi Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB), sebagai sebuah gereja yang hidup di dunia, di Asia, di bumi Indonesia. GPIB juga dituntut untuk memiliki sebuah konsepsi identitas diri yang jelas dalam ia merelevansikan kehadirannya di dunia.

2.5. Sejarah Singkat Gereja Netherland De Kerk

De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indie atau *Indische Kerk De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indie* atau *Indische Kerk* (sekarang Gereja Protestan di Indonesia), yang pertama kali mengadakan kebaktian Protestan pada tanggal 27 Februari 1605 di benteng Victoria Ambon, Maluku. Pada tahun 1619

⁷⁴ Kelima Faktor Tersebut Adalah: *Iklm, Kepemimpinan, Struktur, Tujuan Dan Tugas, Serta Konsepsi Identitas*. Hendriks, *Jemaat Vital Dan Menarik*, Yogyakarta: Kanisius, 2002, Hlm. 20.

⁷⁵ Hendriks, *Jemaat Vital Dan Menarik*, Yogyakarta: Kanisius, Hlm. 172-173.

⁷⁶ Hendriks, *Jemaat Vital Dan Menarik*, Yogyakarta: Kanisius, Hlm. 175.

markas De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indie dipindahkan ke Batavia ketika pusat pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dipindahkan dari Ambon ke Batavia.

Zending adalah upaya penyebaran agama Kristen Protestan. Zending adalah istilah Belanda untuk penyiaran kepada misionaris Kristen Protestan.⁷⁷ Zending mencapai Nusantara dalam beberapa gelombang. Pada gelombang pertama, zending dibawa ke Nusantara oleh Inggris dan Belanda pada abad ke-17. Zending dibawa oleh Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).⁷⁸ Pemberitaan injil Zending bisa mentransformasikan agama Katolik yang pertama kali datang ke nusantara. Zending yang tiba di nusantara saat ini masih berupa delegasi perseorangan, belum berbentuk organisasi zending.

Pada zaman VOC, pemberitaan Injil oleh para misionaris tidak membawa hasil yang besar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kuatnya pengaruh Islam, luasnya wilayah nusantara, sedikitnya tenaga yang tekun dalam pekabaran Injil, dan sikap VOC yang tidak konsisten terhadap penginjilan. Sikap inkonsisten VOC itu karena kepentingan ekonomi dan politik. Para pemimpin VOC

⁷⁷ Dilogo & Dkk. Satu Abad (100 Tahun) GKJ Margoyudan Surakarta. Surakarta: Majelis GKJ Margoyudan Surakarta, 2016. Hlm. 34.

⁷⁸ Enklaar. Sejarah Gereja. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1986. Hlm. 237.

di Nusantara seringkali lebih pragmatis, hanya menginginkan keuntungan ekonomi dan politik. VOC jarang atau tidak terlalu mementingkan penginjilan.⁷⁹

Gelombang berikutnya, zending, sampai ke Nusantara dalam bentuk badan-badan organisasi zending. Mereka datang ke Nusantara pada masa Thomas Stamford Raffles (1811-1816). Organisasi zending tersebut adalah Het Netherland Zendeling Genootschap (NZG). Kedatangan Zending sangat dibantu oleh Thomas Samford Raffles. Namun, masa pemerintahannya singkat. Nusantara jatuh kembali ke tangan Belanda dan mendirikan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda membuat kebijakan khusus penginjilan. Zending memiliki izin untuk melakukan kegiatan penginjilan di daerah-daerah tertentu di mana Islam tidak memiliki pengaruh yang kuat. Pemerintah kolonial Hindia Belanda juga menerbitkan peraturan bagi pendeta Kristen, baik itu dari Eropa dan pribumi. Mereka tidak boleh mengabarkan Injil kecuali mereka memiliki izin dari Gubernur Jenderal.

Keadaan mulai berubah sejak tahun 1850, ketika keadaan di pulau Jawa aman dan terjadi perubahan kebijakan kolonial. Perubahan politik kolonial ini mengambil landasan kekristenan sebagai dasar integrasi antara Kerajaan Belanda

⁷⁹ Anshory, *Mengkristenkan Jawa: Dukungan Pemerintah Kolonial Belanda Terhadap Penetrasi Misi Kristen*. Karanganyar: Penerbit Lir Ilir. 2013, Hlm. 30; Kruger.M. *Sedjarah Geredja Di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia,1996. Hlm. 32.

dan daerah jajahannya. Mulai mengembangkan hubungan baik antara pemerintah dan Zending.

Pada tahun 1854 pemerintah mengeluarkan Regeeringsreglement (Keputusan Pemerintah) yang berbunyi: Guru kristen, pendeta, dan misionaris Kristen harus memiliki izin khusus yang dikeluarkan oleh atau atas nama Gubernur Jenderal jika hendak bekerja di wilayah manapun di Hindia Belanda". Jika izin terbukti merugikan atau jika perjanjian tidak diikuti, Gubernur Jenderal dapat mencabut izin tersebut.⁸⁰

Pemberian izin ini akan memudahkan kedatangan zending berikutnya di Nusantara. Penginjilan yang dilakukan oleh Zending sampai ke pulau Jawa. Namun, ada daerah-daerah di pulau Jawa yang terbatas penginjilannya, seperti daerah-daerah yang mayoritas Muslim seperti Yogyakarta dan Surakarta. Pemerintah Hindia Belanda menyediakan akomodasi bagi pendeta utusan dan barang-barang yang diperlukan di wilayah utusan (Staatsblad van Nederlandsche-Indie, 1854 No. 92). Pemberian akomodasi menandakan bahwa pemerintah kolonial Hindia Belanda memberikan izin untuk penginjilan pada tahun itu.⁸¹

Indische Kerk tidak lahir dari hasil penginjilan melalui badan zending, melainkan dibentuk oleh "pemerintah", dalam hal ini VOC (*Verenigde Oost-*

⁸⁰ Anshory. Mengkristenkan Jawa: Dukungan Pemerintah Kolonial Belanda Terhadap Penetrasi Misi Kristen. Karanganyar: Penerbit Lir Ilir. 2013.Hlm 41.

⁸¹ Pradewi et al. , Peran Zending Dalam Pendidikan Di Surakarta Tahun 1910-1942 Dan Relevansinya Dengan Materi Sejarah Pendidikan, Jurnal CANDI Volume 19/ Tahun X/ No.2/ September 2019. Hlm 160.

Indische Compagnie), dengan mengikut sistem dan struktur dari Gereja Hervormd Belanda.⁸² Maka itu *Indische Kerk* memiliki ketergantungan yang kuat kepada VOC dan di kemudian hari kepada Pemerintah Hindia-Belanda yang menggantikan VOC. Karena begitu tergantung kepada pemerintah, *Indische Kerk* bisa dikatakan tumbuh menjadi tidak mandiri.

Secara teologis gereja tidak bisa bebas mengembangkan teologi dan menjalankan tugas misinya dengan leluasa. Pelayanan dan kesaksian gereja cenderung tertutup dan terbatas pada anggota jemaatnya saja. Secara ekonomi juga gereja bisa hidup “santai”, karena tanggung jawab ekonomi ditanggung oleh pemerintah. Para pendeta dan pegawai dibayar oleh pemerintah, bukan jemaat. Corak kehidupan bergereja pun cenderung mengikuti corak orang-orang pemerintah, yaitu orang-orang Belanda. Mulai dari gedung, bahasa, hingga pakaian, semua bergaya Belanda.⁸³

De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indie mewarisi gereja-gereja peninggalan Portugis yang pelayanannya meliputi beberapa daerah seperti Maluku, Minahasa dan Kepulauan Sunda Kecil (sekarang Nusa Tenggara Timur dan sebagian Nusa Tenggara Barat, khususnya Kepulauan Sumbawa dan sebagian Lombok), serta Jawa, Sumatera dan lain-lain.

⁸² Lontoh & Jonathans, *Bahtera Guna Dharma GPIB*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014, Hlm. 143-144.

⁸³ Lontoh & Jonathans, *Bahtera Guna Dharma Gpib*, Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 2014, Hlm. 145-147.

Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya wilayah pelayanan, cabang-cabang De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indie menghadapi berbagai masalah. Pada tahun 1927 disepakati bahwa keutuhan gereja harus dipertahankan, tetapi seksi-seksi diberi status lebih mandiri sehingga dapat menjalankan tugasnya secara terpisah.

Pada sidang sinode De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indie tahun 1933, jemaat Minahasa, Maluku, bekas wilayah kerajaan Timor dan pulau-pulau sekitarnya disahkan menjadi gereja mandiri atas persekutuan De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indie.

Pada tahun 1934, Jemaat Minahasa dilembagakan sebagai gereja mandiri pertama dengan nama Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM). Setahun kemudian, tahun 1935, jemaat Maluku dilembagakan menjadi gereja mandiri kedua yang disebut Gereja Protestan Maluku (GPM). Setelah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1947, jemaat di wilayah Sunda Kecil dilembagakan sebagai gereja mandiri ketiga yang disebut Gereja Kristen Injili Timor (GMIT).⁸⁴

Setelah Indonesia merdeka, sidang sinode De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indie di Buitenzorg (Bogor) menyepakati pendirian gereja mandiri keempat yang beribadat di Indonesia bagian barat. Disinilah lahirnya gereja mandiri keempat yang disebut GPIB.⁸⁵

⁸⁴ http://p2k.unkris.ac.id/id1/2-3065-2962/Gereja-Protestan-Di-Indonesia_64982_p2k-unkris.html (Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2023).

⁸⁵ Lontoh & Jonathans, *Bahtera Guna Dharma Gpib*, Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 2014. Hal. 148-149.